

Studi: Covid-19 Dapat Memengaruhi Kesuburan Pria

Kesimpulan ini didapat setelah penelitian awal menunjukkan pasien meninggal karena virus tersebut mengalami penurunan jumlah sperma.

JAKARTA (IM) - Studi terbaru menjelaskan infeksi Covid-19 dapat memengaruhi kesuburan para pria. Kesimpulan ini didapat setelah penelitian awal menunjukkan pasien meninggal karena virus tersebut mengalami penurunan jumlah sperma.

Dilansir dari Al Arabiya, Senin (2/8), para peneliti juga menolak apa yang mereka sebut mitos di media sosial tentang efek vaksin Covid-19 pada kesuburan pria. Para ilmuwan dari University of Miami memeriksa enam pasien yang meninggal karena Covid-19. Tiga di antaranya ditemukan mengalami

penurunan jumlah sperma. Virus Covid-19 juga ditemukan di jaringan sel testis salah satu pria yang meninggal karena virus dan satu lagi yang terinfeksi tetapi selamat. Para peneliti juga menyimpulkan vaksin Pfizer dan Moderna ternyata tidak berpengaruh pada sistem reproduksi pria setelah melakukan penelitian pada 45 pria yang divaksinasi. Para ilmuwan membidiki klaim ahli patologi Kanada Roger Hodkinson yang menyebut vaksin dapat menyebabkan infertilitas massal. Sebuah klaim yang diterbitkan oleh

situs Inggris The Daily Expose dan secara teratur memposting konten skeptis terhadap vaksin. "Berlawanan dengan mitos yang beredar di media sosial, vaksin Covid-19 tidak menyebabkan disfungsi ereksi dan infertilitas pria," tulis Ranjith Ramasamy, salah satu peneliti Miami, untuk outlet media akademik The Conversation. Meskipun ukuran sampelnya masih kecil, penelitian tersebut menimbulkan pertanyaan seputar konsekuensi virus Covid-19. Dia menunjuk virus lain termasuk Zika dan gondongan yang diketahui mengenga-

ruhi produksi sperma. Akademisi mencatat penelitian lebih lanjut tentang dampak Covid-19 pada kesuburan pria harus dilakukan. "Saya juga percaya penelitian ini menyajikan pesan kesehatan masyarakat yang mendesak AS untuk vaksin Covid-19," tulis Ramasamy. "Untuk jutaan pria Amerika yang tetap tidak divaksinasi, Anda mungkin ingin mempertimbangkan kembali konsekuensinya jika dan ketika virus yang sangat agresif ini menemukan Anda," ujarnya. ● **tom**

SAMBUNGAN

Februari 2020, tentang laporan penipuan dan penggelapan. Nanti kita tunggu hasil klarifikasi dari pada si pelapor sendiri untuk kita undang," kata Yusri. Seperti diketahui, Heriyanti sempat disebut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus hoaks sumbangan Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 oleh Polda Sumatera Selatan. Namun, status tersangka itu kemudian dibantah oleh instansi yang sama. Setelah menjalani pemeriksaan intensif penyidik reseksi kriminal umum Polda Sumsel, empat orang anggota keluarga Tio dipulangkan, Senin (2/8)

Sebelum Heboh Sumbangan Rp2 Triliun,...

pukul 22.00 WIB. Keempatnya adalah Heriyanti, Sutadi, cucu Tio, dan Darmawan. Sebelumnya, keempatnya digiring anggota reseksi kriminal umum dari Kantor Bank Mandiri cabang Palembang sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan mobil minibus warna hitam. Setelah sembilan jam diperiksa, sekitar 22.00 WIB tiga orang itu meninggalkan Markas Polda Sumatera Selatan menggunakan mobil Mitsubishi Expander warna putih diantar penyidik ke rumahnya kembali di Jalan Tugu Mulyo, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang.

Sedangkan Darmawan meninggalkan Markas Polda Sumatera Selatan lebih dulu menggunakan mobil minibus warna hitam, sekitar pukul 20.20 WIB. Polisi menjaga ketat keluarga itu termasuk menyiapkan petugas di rumah pribadi mereka. Sementara Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meminta polisi untuk menindak tegas oknum penyerahan dana hibah penanggulangan Covid-19 senilai Rp2 triliun apabila terbukti ada unsur kebohongan. Pernyataan itu bukan tanpa alasan sebab uang yang di-

janjikan dari pihak keluarga almarhum Akidi Tio senilai Rp2 triliun tersebut belum cair padahal sudah jatuh tempo sepekan setelah penyerahan simbolis. "Dana itu semestinya sudah masuk dalam rekening bilyet giro Bank Mandiri mereka, tapi saat polisi memeriksa dan menemukan belum ada sama sekali dana tersebut," katanya. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi, sebelumnya menjelaskan alasan penyidik Ditreskrim melakukan pemeriksaan terhadap Heriyanti, anak Akidi Tio atas uang Rp2 triliun untuk

DARI HAL 1

sumbangan Covid-19. "Uang itu direncanakan diserahkan dari bilyet giro Bank Mandiri. Tapi sampai jam 2 siang ini belum ada informasi," katanya dihadapan awak media, Senin 2 Agustus 2021. Karena itu, Heriyanti diundang ke Polda Sumsel untuk memberikan klarifikasi terkait rencana penyerahan uang bantuan sebanyak Rp2 triliun tersebut. "Sampai waktunya bilyet giro ini tidak bisa dicairkan karena masih ada hal teknis yang harus diselesaikan. Jatuh tempo hari ini (kemarin)," katanya. ● **mar**

Kontrak Backdate Proses Alih Status...

pemalsuan surat sebagaimana ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). "Dengan adanya tanggal mundur, menandakan bahwa telah terjadi pembuatan keterangan dalam suatu surat yang tidak sesuai dengan faktanya," kata Aan dalam tayangan Aiman Kompas TV bertajuk "Ada pidana di tes KPK?" pada Senin (2/8). "Kalau ini, maka dalam pidana dalam KUHP masuk di rumusan 263 Ayat 1," ujarnya seraya mengatakan bahwa back date itu termasuk dalam rumusan surat palsu. Polisi sejatinya sudah dapat memproses adanya tindak pidana pemalsuan surat tersebut karena bukan termasuk delik aduan. Sebelumnya, Ombudsman RI menyampaikan hasil temuan soal malaadministrasi dalam alih

status pegawai KPK menjadi ASN melalui penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK). Dalam konferensi pers, Rabu (21/7) lalu anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menyampaikan beberapa temuan antara lain malaadministrasi dilakukan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), salah satunya, melakukan kontrak backdate. Nota kesepahaman ditandatangani 8 April 2021, sedangkan kontrak swakelola 20 April 2021. Namun, tanggal penandatanganan itu diganti untuk menunjukkan seolah dua surat tersebut telah ditandatangani 3 bulan sebelumnya, yaitu 27 Januari 2021. Sehingga, pelaksanaan TWK pada 9 Maret 2021 dilaksanakan tanpa adanya dua surat kontrak tersebut.

"Ini penyimpangan prosedur yang buat kami cukup serius, baik dalam tata kelola suatu lembaga dan terkait masalah hukum," ucap Endi. Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho mengaku bahwa pihaknya baru mengetahui putusan Ombudsman itu dari media massa. Albertina mengakui ada back date antara KPK dan BKN. Menurutnya hal itu merupakan tindak pidana. "Memang ada tanggal mundur, tanggal mundurnya memang ada, di dalam itu sudah ditemukan Ombudsman kan," ujar Albertina. Jika Ombudsman melihat pada kemungkinan adanya malaadministrasi, Dewas KPK melihat pada sudut pandang pelanggaran kode etik.

untuk melakukan tindakan korektif atas temuan Ombudsman RI (ORI) terkait malaadministrasi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparat sipil negara (ASN). Namun, jika dalam waktu 30 hari tersebut KPK tidak menindaklanjuti temuan tersebut, maka Ombudsman RI akan melakukan resolusi dan monitoring selama 60 hari. "Setelah 30 hari, Ombudsman akan memberikan resolusi dan monitoring, itu diberi waktu 60 hari," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam tayangan Aiman Kompas TV, Senin (2/8). "Kalau dalam waktu 60 hari ini tidak diselesaikan, maka Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi," ujarnya. Najih mengatakan, jika Ombudsman mengeluarkan rekomendasi, maka itu merupakan

hasil akhir yang akan disampaikan kepada presiden dan DPR. Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tertinggi, kata dia, tentu bisa mengambil tindakan hukum terhadap bawahannya yang tidak patuh. Apa yang akan terjadi jika presiden tidak mengambil tindakan terhadap apa yang direkomendasikan Ombudsman? Najih pun menjawab bahwa DPR bisa mengambil tindakan atas temuan Ombudsman itu. Kalau Presiden dan DPR tidak melakukan apa-apa atas temuan Ombudsman, apa yang dilakukan Ombudsman? "Ya kita akan menyampaikan kepada masyarakat, bahwa ada penyelenggara negara yang tidak mematuhi hukum, silakan dinilai sendiri, baik itu secara ketatanegaraan atau secara politik," jawab Najih. ● **mar**

Pelaku Usaha, Restoran hingga Mal...

bengkel kecil hingga tempat cucian kendaraan, tetap buka dengan protokol kesehatan yang ketat. Kendati demikian, pedagang kaki lima, toko kelontong, hingga cucian kendaraan hanya diizinkan buka sampai pukul 20.00 waktu setempat. Pengaturan teknis dilakukan oleh pemerintah daerah. Khusus warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya, hanya boleh menerima pengunjung maksimal 3 orang dan waktu makan maksimal 20 menit. Ketentuan

yang sama juga berlaku untuk daerah di Jawa yang menerapkan PPKM level 3. Sementara, pada PPKM Level 2, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan sampai pukul 20.00 waktu setempat. Syarat lainnya, pembatasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas dan waktu makan 30 menit. Pemerintah juga menerapkan sanksi terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan ketentuan PPKM yang diatur dalam Inmendagri. Penerapan

sanksi mengacu pada Pasal 67 sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, saksi berlaku bagi setiap orang yang melanggar aturan terkait pengendalian wabah penyakit menular. Sanksi yang diberikan sesuai Pasal 212 hingga Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selain itu, peraturan dae-

rah, peraturan kepala daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Tito menerbitkan tiga Inmendagri terkait PPKM. Pertama, Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Pengaturan sanksi dimuat dalam diktum ketigabelas. Kemudian, Inmendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4

Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Perihal sanksi diatur pada diktum kesepuluh. Selanjutnya Inmendagri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Aturan mengenai sanksi terdapat pada diktum kesembilanbelas. ● **mar**

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat...

"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi (anggaran) untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (3/8). Dia mengungkapkan, proses perawatan dan pengecatan pesawat itu dilakukan di dalam negeri. "Sehingga secara tidak langsung mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak pandemi," tutur Heru. Sementara terkait pendanaan penanganan pandemi Covid-19, Heru menyebutkan bahwa pemerintah sudah melakukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan. Lebih lanjut Heru menjelaskan, pengecatan Pesawat BBJ 2 sudah direncanakan sejak tahun 2019. Hal ini berbarengan dengan rencana persiapan perayaan

HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tahun 2020. Lalu, proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ. "Namun, pada 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin sehingga yang dilaksanakan pengecatan terlebih dahulu untuk Heli Super Puma dan pesawat RJ," ucap Heru. Heru mengungkapkan, perawatan rutin pesawat presidenan memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi. "Perawatan rutin Pesawat BBJ 2 jatuh pada tahun 2021 dan merupakan perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik, maka tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa Merah Putih sebagaimana telah direncanakan sebelumnya," kata Heru.

"Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan," ujarnya. Sebelumnya, warganet menyuarotri pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang dinilai memboroskan anggaran negara di masa pandemi Covid-19. Salah satu yang menyuarakan hal itu yakni mantan komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie dalam unggahan di akun Twitter resminya @alvinlie21. Menurut Alvin, biaya cat ulang pesawat kepresidenan berkisar antara 100.000 dollar AS hingga 150.000 dollar AS atau sekitar Rp1,4 miliar- Rp2,1 miliar. Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih mementingkan kebutuhan penanganan pandemi daripada mengubah warna pesawat kepresidenan. "Saat negara sedang hadapi

pandemi dan krisis ekonomi, pemerintah seharusnya menunjukkan sense of crisis," kata Alvin, Selasa (3/8). "Hal-hal yang bukan kebutuhan mendesak perlu ditangguhkan. Anggaran difokuskan pada penggalangan pandemi," ujarnya. Alvin mengatakan, dia pertama kali mengetahui perubahan warna pesawat kenegaraan tersebut dari rekan-rekannya sesama spotter atau orang yang hobi memotret pesawat. Ia menjelaskan bahwa biaya perubahan warna pesawat tersebut tidak sedikit. Setidaknya, ada dua metode pengecatan ulang pesawat. Pertama sanding atau cat lama diampelas hingga hilang warnanya dan tersisa warna primer dasar, kemudian dicat dengan warna dan pola baru. Kedua, stripping atau cat lama dikupas total hingga ke

kulit pesawat (bare metal) kemudian dicat ulang. "Yang lazim dilakukan adalah metode sanding, biaya berkisar 100.000 dollar Amerika Serikat per pesawat," ujar Alvin. "Biaya cat ulang saya merujuk pada biaya yang umumnya berlaku untuk pengecatan ulang pesawat B737-800 penerbangan sipil," kata dia. Lebih jauh, Alvin menilai pengecatan ulang atau mengubah warna pesawat bukanlah kebutuhan mendesak. Apalagi pesawat kepresidenan yang kini dipakai pemerintah baru berusia 7 tahun. "Perawatan bagus, penampilan juga masih layak. Tidak ada urgensi dicat ulang atau ubah warna," kata Alvin. "Ingat, tunjangan dan insentif ASN dan anggaran berbagai Lembaga dan Kementerian dipangkas untuk refocusing Anggaran," tuturnya. ● **mar**

Bertambah 33.900 Kasus Positif, ...

Zona Merah Meningkat
Jumlah zona merah Covid-19 di Indonesia kembali meningkat. Sebelumnya, pada 25 Juli

2021 tercatat ada 32 provinsi dengan 195 kabupaten/kota yang mengalami zona merah. Namun pada Selasa (1/8),

jumlahnya bertambah menjadi 33 provinsi dengan 240 kabupaten/kota yang mengalami zona merah. Jawa Timur masih menjadi

provinsi yang paling banyak zona merahnya pada periode kali dengan 32 kabupaten/kota. Disusul Jawa Tengah se-

banyak 27 kabupaten/kota, kemudian Sumatera Selatan dan Lampung masing-masing 13 kabupaten/kota yang mengalami zona merah. ● **mar**

Menkes Ajak Semua Pihak Tekan Angka Kanker Payudara

JAKARTA (IM) - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan kanker payudara harus menjadi masalah besar di berbagai negara berkembang. Laporan angka kematian akibat penyakit ini mencapai 685 ribu kasus sepanjang 2020 dari 2,3 penderita. Untuk itu, ia mengajak semua pihak bersama untuk menekan angka tersebut. Menkes mengaku percaya, dengan bekerja sama, membangun kekuatan, dan mengalokasikan sumber daya yang cukup, negara-negara di Asia Tenggara dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam pengendalian kanker payudara di lingkup kawasan hingga global.

integrasi, mengatasi stigma, kondisi keuangan, dukungan, dan layanan paliatif. "Untuk itu agar efektif, deteksi dini kanker payudara harus ditindaklanjuti dengan efektif, tepat waktu, disertai pengobatan, dan layanan pendukung," katanya. Ia pun berharap agar adanya inisiatif secara global dapat menurunkan angka kematian akibat kanker payudara di dunia sebesar 2,5 persen per tahun, di antara tahun 2020 hingga 2040. Upaya yang dilakukan di antaranya kegiatan promosi kesehatan untuk deteksi dini, diagnosis kanker payudara tepat waktu, dan tata laksana kanker payudara yang komprehensif. Kegiatan SEABCS diikuti dari 22 negara terdiri atas 1.248 peserta, 706 tenaga pendukung, 543 dokter dengan penyampaian yang dipresentasikan sebanyak 70 tema.

Dalam acara yang sama, Dr Julie Torode dari Institute of Cancer Policy/Kings College London menyampaikan pentingnya upaya deteksi dini kanker payudara di kalangan perempuan. Pihaknya melaporkan terdapat 18,1 juta pasien kanker baru di dunia dan 48,4 persen berada di Asia, sedangkan terdapat 9,6 juta kematian akibat kanker di dunia dan 57,3 persen di Asia. "Kata kunci yang menjadi perhatian adalah ekuitas, integrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan," katanya. Sementara itu perwakilan dari WHO, Dr Benjamin Anderson berpendapat bahwa tantangan terbesar kanker payudara adalah kepenyintasan yang meliputi re-

Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) Linda Agum Gumelar memandang perlunya rangkaian program yang berkesinambungan. Mulai dari kebijakan, pelaksanaan di tingkat Puskesmas hingga rumah sakit tipe A, dan profesi tenaga kesehatan. Ini agar upaya penurunan kanker payudara stadium lanjut dapat terlaksana dan memberikan hasil yang nyata. ● **tom**

SAMBUNGAN

Survei: Pasangan Anies-AHY Teratas,...

atau dukungan partai politik murni. "Maka dia harus meyakinkan berbagai partai politik mitra, untuk memberikan dukungan politiknya, membentuk gerbong koalisi," ujar Khoirul. Sementara itu, untuk pasangan Prabowo-Puan justru dinilai memiliki basis atau dukungan partai politik yang kuat. Oleh karena itu, menurut dia, jika mengandalkan kekuatan basis partai politik, persentase pasangan Prabowo-Puan akan terangkat lebih tinggi. Adapun Indostrategi menjalankan survei nasional ini dengan menggunakan metode multi-stage random sampling yang melibatkan

jumlah sampel 2.400 responden di 34 provinsi. Survei ini digelar pada 23 Maret hingga 1 Juni 2021 dengan pendekatan face to face interview memenuhi protokol kesehatan. Margin of error survei ini 2 persen. Adapun lembaga survei Indostrategi belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) sebagai anggota dari Perhimpunan Survei Opini Publik (Pursepi). Menurut Khoirul, hal tersebut dikarenakan proses administrasi di Kemkumham memakan waktu cukup lama. Rilis pun akhirnya digelar sembari menunggu hasil proses akta notaris disahkan di Kemkumham. ● **osm**

Mahasiswa Ini Syok Lihat Mayat...

besar mayat yang kami gunakan di sekolah ada peluru di tubuhnya. Saya merasa sangat sedih ketika saya menyadari bahwa beberapa dari mereka mungkin bukan penjahat sungguhan," tutur Ana. Dia menambahkan bahwa pada suatu pagi dia melihat sebuah mobil polisi penuh dengan mayat-mayat berlumuran darah di sekolah kedokteran mereka, yang memiliki kamar mayat. Tahun lalu, warga Nigeria menggelar aksi demonstrasi besar-besaran memprotes brutalitas polisi.

Engbe kemudian mengirim pesan ke keluarga Divine, yang ternyata telah mencari kerabatnya dari kantor polisi satu ke yang lain, setelah mendapat informasi bahwa Divine dan dua temannya ditangkap oleh petugas keamanan dalam perjalanan pulang dari bepergian di malam hari. Keluarga Divine akhirnya berhasil mengklaim jenazahnya. Apa yang dihadapi Engbe menggarisbawahi dua hal, yakni kurangnya mayat yang tersedia bagi mahasiswa kedokteran di Nigera dan apa yang terjadi terhadap korban kekerasan polisi. ● **osm**

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Prayan Purba.
PENANGGUNG JAWAB: Bambang Suryo Sularso.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI : Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularso.
ARTISITIK : M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI : A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.
AGEN: JOGJA (Hidup Agency), **PADANG** (Karel Chandra), **PALEMBANG** (Angkasa), **SOLO** (ABC), **BELITUNG** (Naskafa Tjen), **PANGKAL PINANG** (Yuliani, John Tanzil), **BALIK-PAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **LAMPUNG** (Kartika), **SURABAYA**, **MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KEUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR : Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro), Riston Pardamean Lubis, Kartoni Lubis.
BIRO SEMARANG : Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN : Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI : Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN : Rp 2.500./leks (di luar kota Rp 3.000./leks), Harga Langganan Rp 50.000./Bulan.
PERCETAKAN : PT. International Media Web Printing
ALAMAT: Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3
 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
Telp : 021-6265566 pesawat 4000
 Fax : 021-639 7652.
Twitter: International Media @redaksi_IM